

The Potential of Singkawang City People From Aspect Of Harmony

Potensi Masyarakat Kota Singkawang Dari Aspek Kerukunan

Suzy Azeharie¹, Wulan Purnama Sari², Lydia Irena³

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: suzya@fikom.untar.ac.id

²Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta*
Email: wulanp@fikom.untar.ac.id

³Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: lydiairena@gmail.com

Masuk tanggal : 24-01-2022, revisi tanggal : 17-10-2022, diterima untuk diterbitkan tanggal : 25-10-2022

Abstract

As a multicultural country, the opportunities for clashes and conflicts in Indonesia are wide open. This is due to the plurality and heterogeneity of Indonesian society which is reflected in the form of cultural diversity, religion, lifestyle in society which is quite complex. In the history of West Kalimantan Province, various horizontal conflicts have alternated, including 1997 and 1999, the Madura conflict with Malay/Dayak etc. The number of fatalities and material losses is incalculable. Singkawang is one of the 12 Level II Regions and 2 Cities in West Kalimantan Province. This city was included as the most tolerant city in Indonesia in two selections by the SETARA Institute. There were hardly any outbreaks of escalating conflict, even though the city is predominantly inhabited by ethnic Malays and Chinese from the Hakka or Khek sub-ethnic. This qualitative research with case study method was conducted with the aim of knowing and describing the potential of the people of Singkawang City from the aspect of harmony. The research was conducted by collecting data through interviews with three resource persons living in Singkawang and Pontianak, namely with researchers from the Institute of Dayakology, Malay ethnic leaders and Dayak ethnic leaders. Another data collection technique was to collect data from research sources, internet journals and from various books. The conclusion of this study is that there are several supporting factors that make the Singkawang people live in harmony. Namely, among others, regional leaders who are considered to represent ethnic groups in Singkawang City. Then the people feel that the city government treats them fairly. This political recognition can be seen from the celebration of religious holidays of each religion which is carried out lively. However, the period leading up to and after the Pilkada is one of the factors to watch out for that can trigger conflict. This is due to the unique composition of the population of Singkawang city, namely the majority are citizens of Chinese descent, while the contestants put forward identity politics.

Keywords: *conflict, harmony, Singkawang, West Kalimantan*

Abstrak

Sebagai sebuah negara yang multikultur maka peluang terjadinya benturan dan konflik di Indonesia terbuka lebar. Hal itu disebabkan kemajemukan dan heterogenitas masyarakat Indonesia yang direfleksikan dalam wujud keanekaragaman budaya, agama, gaya hidup dalam masyarakat cukup kompleks. Dalam sejarah Provinsi Kalimantan Barat, berbagai konflik horizontal silih berganti antara lain tahun 1997 lalu tahun 1999 konflik Madura dengan Melayu/Dayak dll. Jumlah korban jiwa dan kerugian material tidak terhitung lagi. Singkawang merupakan salah satu Kota dari 12 Daerah Tingkat II dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini termasuk sebagai kota paling toleran di Indonesia dalam dua kali seleksi oleh SETARA Institut. Nyaris tidak terjadi letupan konflik yang bereskalasi meskipun kota ini mayoritas dihuni oleh etnis Melayu dan Cina dari subetnis Hakka atau Khek. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan potensi yang dimiliki masyarakat Kota Singkawang dari aspek kerukunan. Penelitian dilakukan dengan teknik mengumpulkan data melalui wawancara dengan tiga orang narasumber yang tinggal di Singkawang dan Pontianak, yaitu dengan peneliti dari Institut Dayakologi, tokoh pemuka etnis Melayu dan tokoh etnis Dayak. Teknik pengumpulan data lainnya adalah dengan menggali data dari sumber penelitian, jurnal internet dan dari berbagai buku. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor pendukung yang membuat masyarakat Singkawang hidup secara rukun. Yaitu antara lain pemimpin daerah yang dianggap mewakili kelompok etnis yang ada di Kota Singkawang. Kemudian masyarakat merasa pemerintah kota memperlakukan mereka secara adil. *Politic of recognition* ini bisa dilihat dari perayaan hari hari besar keagamaan setiap agama yang dilaksanakan secara meriah. Meskipun demikian masa menjelang dan setelah Pilkada merupakan salah satu faktor yang harus diwaspadai dapat memicu konflik. Hal ini disebabkan komposisi penduduk kota Singkawang yang unik yaitu mayoritas merupakan warga keturunan Cina, sementara para konstenstan yang berkontestasi mengedepankan politik identitas

Kata Kunci: Kalimantan Barat, kerukunan, konflik, Singkawang

Pendahuluan

SETARA Institut sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Demokrasi dan Perdamaian bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akhir bulan Februari 2021 yang lalu mengumumkan peringkat kota paling toleran di Indonesia. Kota Singkawang di Kalimantan Barat dinyatakan sebagai kota nomor dua paling toleran setelah Kota Salatiga. Menyusul kemudian Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Kupang, Kota Surabaya, Kota Ambon, Kota Kediri, Kota Sukabumi dan Kota Bekasi (*Singkawang Dinilai Kota Paling Toleran, Wali Kota Tjhai Chui Mie: Semangat Hidup Harmonis*, 2021).

Sebelumnya tahun 2018, Kota Singkawang, 145kilometer dari Pontianak, menduduki peringkat pertama kota paling toleran. Hal tersebut menurut SETARA Institute karena kota ini dinilai memiliki beberapa atribut yang sebagai kota paling toleran se-Indonesia. Atribut itu di antaranya adalah pemerintah Kota Singkawang memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan. Selain itu di Kota Singkawang tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali. Kajian yang dilakukan ini menggunakan indexing Indeks

Kota Toleran (IKT) 2018 terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktek toleransi yang dilakukan oleh pemerintah kota masing-masing (Intan, n.d.).

Kota Singkawang merupakan sebuah kota yang pluralis dan multietnis. Beragam etnis dan budaya mewarnai kehidupan masyarakat kota ini. Data yang diperoleh dari pusat portal data Kalimantan Barat per tahun 2019 jumlah penduduk kota Singkawang mencapai 237.429 dengan proporsi 52,91% agama Islam, 5,38% agama Kristen, 7,43% agama Katholik, 0,02% agama Hindu, 33,81% agama Budha, 0,43% agama Konghuchu, dan 0,01 aliran kepercayaan lainnya (*Proporsi Jumlah Penduduk Kota Singkawang Menurut Agama/Aliran Kepercayaan Tahun 2019*, 2019). Ada tiga kelompok etnis yang dominan di kota ini yaitu etnis Cina, Melayu dan Dayak. Etnis Cina yang kebanyakan tinggal di sini adalah dari Hakka atau Khek yaitu sebesar 42% (Arnadi, 2016; Yew-Foong, 2017).

Tabel 1. Populasi Etnis di Singkawang Berdasarkan Sensus 2000 dan 2010

Etnis	Sensus Penduduk 2000	Sensus Penduduk 2010
Cina	41.7	36.52
Melayu	10.8	32.65
Jawa	27.4	9.35
Madura	5.3	7.06
Bugis	1.3	1.42
Dayak	7.5	8.75
Lain Lain	6.0	4.25

(Sumber Foong, 2017)

Keberagaman etnis dan budaya di Singkawang ini dapat dipandang sebagai sebuah kekuatan untuk memajukan daerah ini akan tetapi sekaligus menjadi potensi ancaman bagi daerah karena munculnya konflik. Ketika pecah konflik antara etnis Melayu/Dayak dengan etnis Madura tahun 1999 dan 2000 di Sambas dan tahun 1997 di Sanggau Ledo (dua jam dari Sambas), Kota Singkawang (yang waktu itu masih menjadi ibukota Kabupaten Sambas) relatif aman. Pertumpahan darah dari konflik di Sanggau Ledo (Kabupaten Bengkayang) maupun di Sambas tidak merembet Singkawang. Padahal Kota Singkawang dengan komposisi penduduk yang multietnis sangat rawan disusupi. Bila melihat catatan sejarah, paling tidak di Kalimantan Barat telah terjadi 12 kali konflik. Sepuluh kali konflik melibatkan etnis Dayak dengan Madura yaitu tahun 1962, 1963, 1968, 1972, 1977, 1979, 1983, 1996, 1997 dan 1999. Lalu konflik antara etnis Dayak dengan Cina tahun 1967 dan dua kali konflik antar etnis Melayu dengan Madura tahun 1999 dan 2000. (Arnadi, 2016; Haba, 2012; König, 2016; Nakaya, 2018; Saad, 2015)

Kelompok imigran Cina dari sub etnis Hakka datang ke Kalimantan Barat sekitar abad 18 (*Sejarah Awal Mula Berdirinya Singkawang Dan Kondisi Geografis, Tempat Singgah Pedagang Dari China*, 2020). Kedatangan migran dari daratan Cina ke Kalimantan Barat menurut Schaank, bertujuan untuk mencari kehidupan baru guna menghindari kelaparan di negaranya. Sementara sub etnis Hakka bermigrasi ke Kalimantan Barat kelompok lainnya dari sub etnis Hokkian bermigrasi ke Jepang, Filipina dan Pulau Jawa (Dewi, 2019).

Dalam sebuah masyarakat multietnis dan pluralis seperti di Indonesia maka kecenderungan akan terjadi hubungan yang tidak harmonis sangat besar seperti dikatakan Schweitzer bahwa kehidupan dan permusuhan pada umat manusia mudah ditemukan dimana mana karena manusia bertindak dan berfikir secara harmonis sekaligus bermusuhan. Keduanya dapat berada secara bersamaan oleh karena itu resolusi konflik adalah sebangun dengan ideologi harmoni dan keduanya harus dianggap sama kuatnya (Arkanudin, 2006).

Konflik pada dasarnya merupakan sebuah keadaan tidak normal dan dipicu umumnya ketegangan antara beberapa pihak yang kemudian bereskalasi menjadi krisis. Dari krisis ini lalu muncul kekerasan terbatas dan akhirnya bereskalasi dengan terjadinya kekerasan massal (Effy, 2010; Malik, 2017). Konflik umumnya timbul ketika terjadi ketidak samaan ekonomi, diskriminasi, kekerasan terhadap hak sosial dan ekonomi, pertentangan dalam meraih tujuan, adanya perbedaan nilai, kemiskinan, keterbatasan sumber daya dan terjadi perbedaan kepentingan pada individu, kelompok dan masyarakat (Deiwiks et al., 2012; Hillesund, 2021; Malik, 2017) .

Oleh karena itu penting dilakukan kajian mengenai potensi masyarakat Kota Singkawang dari aspek kerukunan. Aspek aspek apa saja yang ada dalam masyarakat Kota Singkawang yang berkontribusi dalam kerukunan. Sebab meskipun kota ini dikenal sebagai sebuah kota yang toleran tapi konflik sosial akan selalu terjadi di dalam interaksi manusia (Malik, 2017). Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: apakah potensi masyarakat Kota Singkawang dari aspek kerukunan? Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan potensi yang dimiliki masyarakat Kota Singkawang dari aspek kerukunan.

Beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain teori konflik. Konflik pada hakekatnya merupakan sebuah keadaan tidak normal. Umumnya dipicu ketegangan antara beberapa pihak yang kemudian bereskalasi menjadi krisis. Dari krisis ini lalu muncul kekerasan terbatas dan akhirnya bereskalasi dengan terjadinya kekerasan massal (Effy, 2010; Malik, 2017). Tahapan konflik meliputi tiga tahap yaitu ekspresi keluhan atau *grievance expression*, lalu konflik dan terakhir perselisihan atau *disputing* (Effy, 2010). Selain teori konflik maka konsep keberagaman juga akan menjadi landasan teori penelitian ini. Keberagaman merupakan kondisi suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan budaya, seperti suku, ras, agama sampai ideologi. Keragaman ini menunjukkan perbedaan dalam masyarakat. Song mengatakan awal dari konsep keberagaman ini adalah disebabkan “*modern states are organized around the language and culture of the dominant groups that have historically constituted them. As a result, members of minority cultural groups face barriers in pursuing their social practices in ways that members of dominant groups do not*” (Song, 2010).

Tema kajian mengenai konflik dan kerukunan juga telah dilakukan, salah satunya penelitian mengenai peran dari komunikasi antar budaya dalam menjaga kerukunan pada masyarakat Dayak, kemudian juga mengenai praktek budaya Tatung sebagai perekat keberagaman di Kota Singkawang yang diwujudkan dengan adanya pawai budaya (Purmintasari & Yulita, 2017; Tamburion, 2018). Penelitian ini sendiri berfokus pada potensi yang dimiliki dari masyarakat Kota Singkawang sebagai perekat kerukunan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui tentang potensi masyarakat Kota Singkawang dari aspek kerukunan. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati (Bungin, 2011; Lexy J. Moleong, 2017).

Menurut Creswell ada lima jenis metode penelitian kualitatif yaitu naratif, fenomenologi, *grounded-theory*, etnografi, dan studi kasus (Creswell, 2019). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang berpusat pada sebuah fenomena, variabel, pada sesuatu atau sebuah kasus yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu guna mendapatkan pengertian secara utuh, fenomena yang dapat dijadikan sebuah kasus dapat berubah orang, kelompok, organisasi atau suatu peristiwa. Tujuan umum dari penelitian studi kasus adalah untuk mencari “*how*” dan “*why*” dari suatu fenomena. (Cope, 2015; Yin, 2014)

Subyek penelitian ini adalah narasumber, tokoh adat Dayak/Melayu. Sementara obyek penelitian adalah potensi masyarakat Kota Singkawang dari aspek kerukunan. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain data primer dengan melakukan wawancara terhadap tiga orang narasumber, kemudian melakukan observasi langsung ke Kota Singkawang, melakukan pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan dan penelusuran data *online*.

Hasil Penemuan dan Diskusi

Asal kata Singkawang adalah *San Keuw Jong* sebuah sebutan yang diberikan oleh penambang Cina sub etnis Hakka yang datang dari Provinsi Kwantung dan Fukien abad ke 18 ke daerah Kalimantan Barat. Arti *San Keuw Jong* adalah Gunung Mulut Lautan, yang berarti sebuah kota di kaki gunung dan menghadap ke laut atau mulut sungai. Ketika pecah konflik antara etnis Melayu dan Madura di tahun 1999 dan 2000 di Kabupaten Sambas yang hanya berjarak sekitar dua jam dari Kota Singkawang, konflik tersebut tidak merembet ke Kota Singkawang yang jaraknya hanya sekitar 90KM dari episentrum konflik. Padahal Singkawang kala itu merupakan ibukota Kabupaten Sambas dan baru menjadi kota administratif sendiri tahun 2001. (*SEJARAH*, n.d.; Yusra & Nugroho, 2019).

Menurut narasumber Arnadi yang menjabat sebagai ketua Majelis Adat Melayu di Kota Singkawang, salah satu faktor yang membuat masyarakat Kota Singkawang tidak ikut tersulut konflik saat itu didasari latar belakang bahwa karena

menjadi ibukota Kabupaten maka umumnya masyarakat yang tinggal di Kota Singkawang relatif lebih berpendidikan dibandingkan dengan yang tinggal di pedalaman. Demikian juga dengan kelompok etnis Madura yang bermukim di Kota Singkawang, mereka relatif lebih terpelajar daripada di tempat lain karena umumnya merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (wawancara dengan Arnadi 19 September 2021). Ketika terjadi konflik di Sambas, penduduk etnis Melayu yang bermukim di Kota Singkawang tidak terprovokasi untuk ikut memerangi kelompok Madura. Bahkan banyak penduduk etnis Melayu di Kota Singkawang yang menyediakan tempat pengungsian bagi orang-orang Madura dari Sambas (wawancara dengan Arnadi, 19 September 2021).

Selain itu karena Kota Singkawang merupakan kota terbesar di Kabupaten Sambas, maka komposisi demografinya jauh lebih heterogen dibandingkan kota-kota lain yang ada di sekitarnya. Komposisi masyarakat Kota Singkawang yang lebih heterogen dicerminkan dengan mayoritas etnis Cina yang mendominasi yaitu sekitar 37%, Melayu 33%, Jawa 9,5% dan Dayak 9% (Yew-Foong, 2017). Karena heterogenitas tersebut maka setiap kelompok etnis cenderung terbiasa melakukan interaksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya lain.

Faktor kedua lainnya yang membuat kehidupan masyarakat Kota Singkawang cenderung harmonis adalah letak rumah ibadah yang berdekatan. Kota Singkawang luasnya hanya 50,400 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 223 ribu (Hidayati, 2014). Bandingkan dengan luas kota Jakarta yang mencapai 662 kilometer dengan jumlah populasi hampir 11 juta orang. Karena luasnya tidak seberapa maka lokasi rumah ibadah di Kota Singkawang antara satu dengan yang lain berdekatan. Klenteng dengan masjid berdekatan demikian juga dengan gereja, di Kota Singkawang, Mesjid Raya Singkawang di Jalan Merdeka no. 21 Pasiran Singkawang Barat yang terletak berdekatan, sekitar 200 meter, dengan Vihara Tri Dharma Bumi Raya yang merupakan vihara tertua di Singkawang. Mesjid Raya Singkawang ini terletak di tengah kawasan pecinan, tempat tinggal kelompok etnis Cina. Karena letak tempat beribadah yang berdekatan maka diduga hal tersebut membuat penduduk kota Singkawang melakukan adaptasi sosial dan bertoleransi pada kepercayaan pemeluk agama lain. Data BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa di Kota Singkawang terdapat 124 mesjid, 24 gereja Katolik, 84 gereja Protestan, 60 vihara dan 14 klenteng (*Badan Pusat Statistik Kota Singkawang*, 2020).

Meskipun demikian perlu diberi catatan bahwa setelah Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Kepres Nomor: 06 Tahun 2000 tentang Pencabutan Intruksi Presiden Nomor: 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang membuat adat istiadat masyarakat “Cina” (Konghucu) kembali dilakukan secara terbuka seperti peringatan Hari Raya Imlek, perayaan Hari Cap Go Meh, termasuk pendirian Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) maka di Pemangkat sekitar 40 menit dari Singkawang terdapat gesekan gesekan akibat Kepres tersebut. Fenomena yang terjadi menurut Muchtar adalah perebutan aset tempat ibadah yang menjadi sumber perselisihan kedua komunitas yaitu umat Konghucu yang bergabung dalam Majelis Agama Konghucu Indonesia dengan umat Budha Tri Dharma. (Muchtar, 2014)

Agama Islam dipercaya masuk ke daerah Kalimantan Barat dibawa oleh salah satu pedagang Cina yang terkenal dengan nama Cheng Ho yang membangun pemukiman di tempat ini sekitar tahun 1407 sampai 1477. Mesjid Raya Singkawang dibangun oleh dua orang saudagar permata dari Kalkuta India bernama Bawasahib Marican dan anaknya Achmad Marican. Keduanya berasal dari Distrik Karikal, di Kalkuta India dan tiba sekitar tahun 1870. Oleh Belanda, Bawasahib Marican diangkat sebagai ‘kapiten India’ yang bertugas mengurus segala kepentingan etnis India kala itu. (Saliro et al., 2021)

Faktor ketiga yang diidentifikasi peneliti sebagai potensi Kota Singkawang adalah faktor komposisi etno religius pemimpin Kota Singkawang. Tahun 2017 Tjhai Chui Mie terpilih menjadi perempuan Walikota pertama dengan meraih suara 42, 6%. Seperti pada Pilkada sebelumnya, kandidat yang berlaga menerapkan strategi berpasangan dengan merujuk pada komposisi etno-religius pemilih. Tjhai Chui Mie yang berpasangan dengan Irwan Wawako berhasil menarik perhatian pemilih keturunan Cina, etnis Dayak serta Melayu. Arifin dalam Foong mengungkapkan bahwa keberhasilan kampanye Tjhai Chui Mie merupakan kesuksesan terbesar dibandingkan dengan kandidat keturunan Cina lainnya yang berkontestasi di wilayah Indonesia. Hal itu disebabkan faktor proporsi etnis keturunan Cina di kota Singkawang merupakan yang tertinggi di seluruh negeri yaitu 36, 52% (Yew-Foong, 2017). Pengalaman politis Tjhai Chui Mie yang cukup panjang karena ia telah tiga kali berturut turut menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang yaitu periode 2004-2009, lalu 2009-2014 dan 2014-2019 memikat hati pemilih Kota Singkawang (Kartika et al., 2018).

Wakilnya, Irwan Wawako merupakan keturunan Melayu yang beristrikan orang Madura. Ia dapat menarik perhatian pemilih baik dari etnis Bugis, Melayu maupun kelompok Cina Muslim (Dewi, 2019). Irwan sebelumnya merupakan Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri keturunan Bugis Melayu beragama Islam. Ayahnya merupakan komandan militer di Kelurahan Tujuh Belas, Singkawang Selatan. Sehingga bila Tjhai Chui Mie selama berpuluh tahun membangun hubungan erat dengan kelompok etnis Cina di Singkawang maka Irwan menjalin hubungan erat dengan kelompok Bugis, Melayu dan kelompok pemuda Cina.

Foong (2017) menambahkan faktor keberhasilan pasangan Tjhai dan Irwan karena mendapat banyak dukungan dari kekuatan politik etno religius elite Cina Singkawang yang berada di Jakarta. Fenomena yang terjadi pada Tjhai Chui Mie dan Irwan Wawako sesuai dengan yang dikemukakan Firmanzah yang menyatakan bahwa dalam Pemilihan Umum terdapat dua jenis modal politik, yaitu yang pertama adalah modal kapital atau uang yang digunakan untuk membiayai kampanye. Politisi dan partai politik yang memiliki modal uang yang besar memiliki kekuasaan untuk merancang program kampanye yang masif dan terintegrasi. Modal yang kedua adalah modal sosial yaitu partai politik atau politisi mengedepankan akumulasi dari kredibilitas, popularitas dan jaringan yang terdapat di masyarakat. Modal sosial ini dibangun melalui interaksi dinamis dengan masyarakat.

Hubungan kedekatan pribadi Tjhai Chui Mie dengan pemuka masyarakat Dayak dan Melayu membuat bila terjadi letupan konflik maka akan lebih mudah untuk diselesaikan (Dewi, 2019). Sementara menurut narasumber yang diwawancarai terpilihnya Tjhai Chui Mie membuat kelompok etnis Cina merasa terwakilkan begitu juga dengan kelompok Dayak, Melayu yang merasa terwakilkan dengan terpilihnya Irwan Wawako sebagai Wakil Walikota Singkawang (wawancara dengan Arnadi, 16 September 2021).

Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa strategi berpasangan pemilihan Walikota berdasarkan komposisi ethno-religius telah diterapkan sejak pemilihan umum tahun 2005 oleh kontestan yang ikut pemilihan langsung pertama tahun 2005 di Kota Singkawang. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan strategi berpasangan berbasis ethno religius pada pemilihan umum tahun 2005.

Tabel 2. Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2005

No	Calon Walikota/Wakil Kota	Partai Politik Pengusung	Etnis
1	Suryadi Wijaya/Bong Wui Khong	PDS, Patriot Pancasila, PPDK, PKP Indonesia, PKS, PPNUI, PNI Marhaenisme, Merdeka, PBB, PKPB, PKB, PBSB,	Melayu/CinaTiongho
2	Syafe'i Djamil/Felix Feriyadi	Demokrat dan Pelopor	Melayu/Cina
3	Hasan Karman/Edy R. Yacoub	PIB dan PPP	Cina/Melayu
4	Darmawan/Ignasius Apui	PDI Perjuangan	Sunda/Cina
5	Awang Ishak/Raymundus Sailan	PNBK, PSI, PPDI, GOLKAR, PAN, PBR.	Melayu/Dayak

(Sumber: Yacoub, 2015)

Pada pemilihan langsung pertama tahun 2005, politik identitas etnis dalam pemilihan Kepala Daerah mulai dikedepankan dan menjadi fenomena dengan terpilihnya pasangan nomor tiga yang menyandingkan pasangan etnis Cina yaitu Hasan Karman dan etnis Melayu Edy R. Yacoub. Menurut Anes, sejak pemilihan umum pertama tersebut maka berbagai manuver politik, stigma, ujaran kebencian berbalut identitas rasial, hingga bentuk-bentuk kekerasan simbolik terjadi. Politik identitas yang mewarnai dinamika politik demokrasi di Kota Singkawang yang mengarah pada saling curiga antar warga (2018). Pemilihan Umum terakhir yang diadakan tahun 2017 juga mengikuti pola strategi berpasangan berbasis ethno religius, kecuali untuk kontestan mandiri, yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017

No	Pasangan Calon	Partai Pendukung
1	Tjhai Nyit Kim, SH dan H. Suriyadi. MS, S.Sos, M.Si	Golkar, PPP, PKPI (6 kursi)
2	Tjhai Chui Mie, SE dan Drs. H. Irwan, M.Si	PDIP, Nasdem, Hanura, Demokrat (14 kursi)
3	H. Abdul Mutalib, SE, ME dan Muhammadin, SE	Gerindra, PKB, PAN, PKS (10 kursi)
4	Andi Syarif T.U.W, ST, MT, M.Si dan dr. H. Nurmansyah	Perseorangan

(Sumber: Kartika et.al, 2018)

Pada pemilihan Walikota Singkawang tahun 2017 ini ada dua figur perempuan yakni Tjhai Nyit Khim dan Tjhai Chui Mie. Keduanya sama sama mengambil posisi calon Walikota, sama-sama beretnis Tionghoa dan sama-sama bermarga Tjhai. Kedua calon perempuan Walikota ini juga telah dikenal oleh masyarakat Singkawang. Tjhai Nyit Kim merupakan istri dari Walikota petahana Awang Ishak sedangkan Tjhai Chui Mie dikenal karena karirnya sebagai anggota DPRD Singkawang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Kartika et al., 2018).

Tjhai Nyit Kim yang dikenal sebagai istri dari Walikota Singkawang 2012-2017 Awang Ishak merupakan orang baru dalam politik meskipun ia pernah bertarung di Pemilihan Umum tahun 2014 dan gagal terpilih. Masyarakat Singkawang melihat pencalonan Tjhai Nyit Kim sebagai usaha Awang Ishak, suaminya, memperpanjang masa jabatan melalui politik kekerabatan sekaligus sebagai taktik memecah sebagian suara etnis Cina dari Tjhai Chui Mie. Hasil pemilihan menunjukkan bahwa Tjhai Nyit Kim memiliki suara yang paling sedikit yaitu 13, 55% (Kartika, 2018).

Potensi berikutnya dari masyarakat Singkawang yang dapat diidentifikasi adalah perayaan hari hari besar keagamaan yang diselenggarakan pemerintah kota. Ketika Natal seluruh kota Singkawang diterangi lampu hias berbentuk cemara. Sementara ketika Imlek kota menjadi lebih meriah dengan pemasangan lampion berwarna merah di sepanjang jalan jalan utama kota. Sementara saat Hari Raya Idul Fitri, kota dihias dengan ornamen ketupat yang digantungkan di seluruh penjuru kota (wawancara dengan Jakius Sinyor, 17 September 2021). Hal ini menurutnya membuat setiap kelompok masyarakat merasa diperlakukan secara berimbang karena merasa Pemerintah Kota bersikap adil. Hal tersebut sesuai dengan teori *politic of recognition* yang dikemukakan oleh Charles Taylor yang mengandung dasar persamaan serta meskipun terdapat perbedaan namun diakui dan dilindungi (Medlock, 2012).

Perasaan puas masyarakat terhadap hari hari besar keagamaan ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Joachim Watch yang menulis bahwa ada hubungan interdependensi dialektis antara agama dan masyarakat. Atau dengan kata lain agama berpengaruh besar terhadap pembentukan dan pengembangan masyarakat dan masyarakat dapat pula memberikan nuansa, rasa dan sikap keagamaan spesifik

yang terdapat dalam suatu lingkungan atau kelompok sosial. (Fidiyawati & Ulya, 2019; Rahawarin, 2013)

Sementara apabila merujuk pada lima unsur kualitas kerukunan umat beragama yang diungkapkan Lubis, maka kelima unsur tersebut di Kota Singkawang dapat ditemui. Yaitu yang pertama adanya nilai religius. Mutu dari kerukunan hidup umat beragama direpresentasikan dari sikap religius umatnya. Unsur yang kedua adalah mutu dari toleransi hidup umat beragama yang mencerminkan pola interaksi antar umat beragama yang harmonis, yang dapat terlihat dari hubungan serasi, senada dan seirama, sikap tenggang rasa dan saling menghormati, saling mengasihi saling peduli berdasarkan nilai persahabatan. Selanjutnya unsur yang ketiga adalah mutu toleransi umat beragama ditujukan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana antar umat beragama yang interaktif, bergerak kedepan, bersemangat dalam mengembangkan nilai kepedulian. Kemudian unsur yang keempat adalah kualitas kerukunan hidup umat beragama diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif dan yang kelima adalah unsur kualitas toleransi ditekankan pada pembentukan suasana nilai produktivitas umat, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat.

Potensi lain yang menjadi kekuatan masyarakat Kota Singkawang sehingga membuat konflik tidak meletup dan bereskalasi adalah keeratan hubungan di antara pemuka masyarakat di Kota Singkawang termasuk dari pihak Kepolisian dan Pemerintah Kota. Pemuka masyarakat mempunyai prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi hal-hal yang sifatnya akan menimbulkan konflik, sebaiknya tidak dilakukan. Contoh yang dikemukakan adalah ketika tahun 2013 ada rencana yang dicetuskan kelompok etnis Cina untuk mendirikan patung Abdurrachman Wahid. Sebagai presiden ke 4 Republik Indonesia. Gus Dur mencabut Inpres 14/1967 yang melarang warga keturunan Cina merayakan hari besar keagamaan. Ia juga mengeluarkan Keppres 6/2000 yang menjamin perayaan keagamaan bagi kelompok ini diperbolehkan. Pendirian patung Abdurachman Wachid ini digagas karena dapat dijadikan pusat kesadaran kebhinekaan masyarakat Indonesia. Namun menurut narasumber patung yang akan dibangun tersebut adalah patung yang menggambarkan Gus Dur sedang bersantai di pantai dengan menggunakan celana pendek tanpa kemeja.

Mengetahui rencana tersebut, maka pemuka masyarakat Singkawang berdiskusi apa yang akan terjadi bila patung tersebut didirikan. Sebab kalau patung berdiri maka dapat dianggap sebagai penghinaan, sebab Gus Dur tidak menggunakan busana yang layak, hanya memakai celana pendek. Hasil rembukan tersebut disampaikan pada pemuka masyarakat Cina yang dapat menerima pemikiran tersebut (wawancara dengan Arnadi, 16 September 2021).

Di Kota Singkawang terdapat perkumpulan Majelis Adat Melayu, sementara kelompok Dayak berhimpunan di organisasi yang dinamakan Dewan Adat Dayak atau DAD, ada juga Forum Komunikasi Pemuda Melayu, sementara kelompok etnis Cina bergabung dalam MABT juga ada paguyuban kecil lainnya yang menghimpun kelompok Jawa, Madura, Bugis dll. Dan menurut narasumber Jakius Sinyor yang merupakan Ketua Dewan Adat Dayak seluruh paguyuban tersebut bersinergi dan saling membantu. Meskipun berbeda tapi perbedaan itu bukan

menjadi perpecahan melainkan sebagai penguat (wawancara dengan Jakius Sinyor, 17 September 2021). Peneliti melihat lembaga lembaga tersebut menjadi modal sosial sekaligus potensi perdamaian dalam upaya mencitakan kerukunan di masyarakat.

Narasumber melihat anggota kelompok masyarakat di Singkawang meskipun berasal dari etnis Melayu maupun Cina namun tidak menunjukkan keegoan sebagai sosok Melayu atau sebagai sosok Cina. Menurutnya tidak ada etnis di Kota Singkawang yang bersikap eksklusif, etnosentris dan menunjukkan keegoan suku. Kemungkinan hal ini dipelajari dari tragedi yang terjadi di Sambas lebih dari 20 tahun yang lalu. Di Singkawang menurutnya sejak dulu sudah tidak ada kelompok yang bersikap eksklusif. Bahkan banyak orang Cina yang menikah dengan Melayu, orang Jawa menikah dengan orang Cina. Sehingga proses asimilasi budaya sudah terjadi sejak lama dan bukan lagi menjadi hal baru di masyarakat Singkawang (wawancara dengan Jakius Sinyor, 17 September 2021).

Dari wawancara bisa terlihat tampaknya pada masing masing kelompok primordial di Kota Singkawang telah timbul kesadaran bahwa jika konflik meletup dan bereskalasi maka dapat menimbulkan kerugian luar biasa besar baik bagi pihak-pihak yang bertikai dan juga bagi daerah. Apalagi bila karena konflik tersebut pihak ketiga masuk yang membuat pertikaian akan semakin panas.

Simpulan

Masyarakat Kota Singkawang sangat unik karena populasi keturunan Cina menjadi mayoritas yaitu sekitar 36, 52% sementara jumlah pemeluk agama Islam di Kota berpenduduk 255 ribu jiwa ini lebih dari 51%. Ketika konflik Sambas meletus tahun 1999, Kota Singkawang yang saat itu masih menjadi ibukota Kabupaten Sambas dan hanya berjarak 1,5 jam dari pusat kerusuhan tidak terimbas konflik.

Beberapa potensi masyarakat Kota Singkawang yang dapat diidentifikasi antara lain adalah karena merupakan kota terbesar dahulunya di daerah Kabupaten Sambas maka umumnya masyarakat yang tinggal di Singkawang berpendidikan lebih tinggi dan hidup secara inklusif. Mereka terbiasa berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar budaya berbeda. Pemerintah Kota Singkawang juga dinilai bersikap cukup adil ketika perayaan hari hari besar keagamaan berlangsung dengan merayakan kegiatan tersebut secara berimbang. Selain itu bangunan tempat beribadah umat letaknya berdekatan sehingga secara tidak langsung mengajarkan pada masyarakat tentang makna perbedaan. Potensi lainnya adalah pemuka masyarakat yang datang dari beragam etnis dan kepercayaan memiliki hubungan cukup erat.

Rekomendasi yang peneliti sarankan merupakan pengembangan dari penelitian ini, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas dari faktor harmonisasi yang dimiliki masyarakat Kota Singkawang dalam menjaga kerukunan. Selain itu, penelitian juga dapat dikembangkan dengan mengkaji kebijakan pemerintah Kota Singkawang dalam hal menjaga keharmonisan.

Ucapan Terimakasih

Tanpa kebaikan dari Dr. Arnadi, Ir, Jakius Sinyor dan Oktavianus dari Institut Dayakologi maka penelitian ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu terimalah ucapan terimakasih peneliti untuk waktu yang telah diberikan guna diwawancarai. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kemdikbudristek sebagai pemberi dana hibah penelitian.

Daftar Pustaka

- Arkanudin, A. (2006). Menelusuri Akar Konflik Antaretnik. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 7(2), 185–194. <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1276>
- Arnadi, A. (2016). *Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Membudayakan Sikap Pluralisme Agama pada Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Singkawang*. Universitas Negeri Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Singkawang. (2020). <https://singkawangkota.bps.go.id/publication/2020/09/18/01d26783e564b58bceabc3f1/statistik-daerah-kota-singkawang-2020.html>
- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana*. <https://doi.org/10.1002/jcc.21776>
- Cope, D. G. (2015). Case Study Research Methodology in Nursing Research. *Oncology Nursing Forum*, 42(6), 681–682. <https://doi.org/10.1188/15.ONF.681-682>
- Creswell, J. W. (2019). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Deiwiks, C., Cederman, L. E., & Gleditsch, K. S. (2012). Inequality and conflict in federations: *Journal of Peace Research*, 49(2), 289–304. <https://doi.org/10.1177/0022343311431754>
- Dewi, K. H. (2019). Chinese indonesian women in local politics: The political rise of t'hai chui mie in singkawang. *Asian Women*, 35(2), 53–74. <https://doi.org/10.14431/AW.2019.06.35.2.53>
- Effy, R. (2010). *Perilaku Komunikasi Konflik*. Arum Mandiri Press.
- Fidiyawati, A., & Ulya, U. (2019). Kerukunan Beragama Perspektif Para Pemuka Agama Dan Kepercayaan Di Karangrowo Kudus. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 5(2), 173–186. <https://doi.org/10.18784/smart.v5i2.842>
- Haba, J. (2012). Etnisitas, Hubungan Sosial dan Konflik di Kalimantan Barat. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 14(1), 31–52. <https://doi.org/10.14203/JMB.V14I1.86>
- Hidayati, S. (2014). Problematika Pembinaan Muallaf di Kota Singkawag dan Solusinya Melalui Program Konseling Komrehensif. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 15(1), 111–136. <https://doi.org/10.14421/JD.2014.15106>

- Hillesund, S. (2021). To fight or demonstrate? Micro foundations of inequality and conflict: *Conflict Management and Peace Science*, 39(2), 166–190. <https://doi.org/10.1177/07388942211017881>
- Intan, G. (n.d.). *SETARA Institute: Singkawang, Kota Paling Toleran Se-Indonesia / Setara Institute*. Setara Institute. Retrieved January 21, 2022, from <https://setara-institute.org/setara-institute-singkawang-kota-paling-toleran-se-indonesia/>
- Kartika, I., Rahmatunnisa, M., & Yuningsih, N. Y. (2018). Modal Politik Tjhai Chui Mie Dalam Pemilihan Walikota Singkawang Tahun 2017. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(2), 139–149. <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/18526>
- König, A. (2016). Identity Constructions and Dayak Ethnic Strife in West Kalimantan, Indonesia. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 17(2), 121–137. <https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1146917>
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik – Jembatan Perdamaian*. Kompas Media Nusantara.
- Medlock, G. (2012). The Evolving Ethic of Authenticity: From Humanistic to Positive Psychology. *New Pub: American Psychological Association*, 40(1), 38–57. <https://doi.org/10.1080/08873267.2012.643687>
- Muchtar, I. H. (2014). Dinamika Hubungan Antar Umat Beragama: “Studi Kasus Penanganan Konflik Umat Buddha Tri Dharma Dengan Konghucu (MAKIN)” Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Harmoni*, 13(1), 90–107. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/142>
- Nakaya, A. (2018). Overcoming ethnic conflict through multicultural education: The case of West Kalimantan, Indonesia. *International Journal of Multicultural Education*, 20(1), 118–137. <https://doi.org/10.18251/ijme.v20i1.1549>
- Proporsi Jumlah Penduduk Kota Singkawang Menurut Agama/Aliran Kepercayaan Tahun 2019*. (2019). SATU DATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT. <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/proporsi-jumlah-penduduk-kota-singkawang-menurut-agama-aliran-kepercayaan-dan-jenis-kelamin/resource/61df1c18-be85-49b2-a25b-166a65fea13f>
- Purintasari, Y. D., & Yulita, H. (2017). Tatung: Perekat Budaya di Singkawang. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1), 1–7. <https://doi.org/10.21831/socia.v14i1.15886>
- Rahawarin, Y. (2013). Kerjasama Antar Umat Beragama: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual. *KALAM*, 7(1), 95–120. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/451/2626>
- Saad, M. M. (2015). A Study on the Covergence of Ethnic Groups Post the Sambas Conflict: How do People in Singkawang City Manage the Assimilation Pattern of Their Multiple Ethnicities. *Research on Humanities and Social Sciences*, 5(22), 121–127. <https://core.ac.uk/download/pdf/234674798.pdf>

- Saliro, S. S., Muchsin, T., & Baharuddin, B. (2021). Toleransi Meja Makan: Bisnis, Budaya Pedagang Kuliner, dan Interaksi Sosial Pedagang di Kota Singkawang. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 5(1), 31–40. <https://doi.org/10.23971/NJPPI.V5I1.2430>
- SEJARAH . (n.d.). Portal Singkawang Kota. Retrieved January 23, 2022, from <https://portal.singkawangkota.go.id/sejarah/>
- Sejarah Awal Mula Berdirinya Singkawang dan Kondisi Geografis, Tempat Singgah Pedagang dari China. (2020, April 1). *Tribun Pontianak*. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/04/01/sejarah-awal-mula-berdirinya-singkawang-dan-kondisi-geografis-tempat-singgah-pedagang-dari-china>
- Singkawang Dinilai Kota Paling Toleran, Wali Kota Tjhai Chui Mie: Semangat Hidup Harmonis. (2021, February 21). *INews.Id*. <https://kalbar.inews.id/berita/singkawang-dinilai-kota-paling-toleran-wali-kota-tjhai-chui-mie-semangat-hidup-harmonis>
- Song, S. (2010). *Multiculturalism*. <https://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/>
- Tamburian, H. D. (2018). Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Dayak Dalam Menjaga Kerukunan Hidup Umat Beragama. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 77–86. <https://doi.org/10.24912/JK.V10I1.1220>
- Yacoub, E. R. (2015). *Strategi Politik Identitas Etnis Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Singkawang Tahun 2007* [Universitas Padjajaran]. <http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/19447>
- Yew-Foong, H. (2017). Decentralization and Chinese Indonesian Politics: The Case of Singkawang, West Kalimantan. *ISEAS Perspective*, 19, 1–10. <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/18/tjhai-chui-mie-singkawangs-first-female->
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks.
- Yusra, K. A., & Nugroho, C. (2019). Produksi Film Dokumenter Perantara Dewa (Film Dokumenter Tentang Tatung Di Kota Singkawang). *EProceedings of Management*, 6(2). <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/10583>